

Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Desa Gapit Kecamatan Empang

Rudi Masniad¹, Kamaruddin², Silvy Amalia³

1. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*
2. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*
3. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

Email:

rudimasniadi@universitassamawa.ac.id

kamaruddin@universitassamawa.ac.id

silvyamalia11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Gapit Kecamatan Empang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan di Desa Gapit dengan menggunakan data primer berupa informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa populasi dalam penelitian ini seluruh warga masyarakat Desa Gapit dengan penarikan sampel secara snowball sampling sebanyak enam orang masyarakat Desa Gapit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pemekaran desa Gapit cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perkembangan pembangunan sarana dan prasarana. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan dan sarana jalan yang cukup meningkat dari tahun sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran. Sedangkan dilihat dari tingkat jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat bahwa seluruh informan telah memiliki dua pekerjaan sehingga dari kedua sumber pendapatan tersebut mereka mampu meningkatkan perekonomiannya. Begitupula pada tingkat pendapatan menunjukkan hasil yang meningkat pula, yakni dari keseluruhan informan memiliki pendapatan tambahan yang meningkat setiap bulannya jika dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran.

Kata kunci: *Dampak Pemekaran dan Kesejahteraan Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, dilakukan penataan daerah yang mempunyai tujuan, salah satunya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan yang dimaksud adalah dengan pemekaran

daerah termasuk desa. Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.

Menurut Juanda (2007), tujuan pemekaran wilayah yang memiliki suatu pemerintahan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membentuk daerah yang mandiri dan demokratis. Tujuan ideal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme birokrasi daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, dapat menciptakan kesempatan lebih luas untuk masyarakat, serta dapat akses langsung pada unit-unit pelayanan publik yang tersebar dan mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan maupun kota.

Desa Gapit kecamatan Empang kabupaten Sumbawa merupakan sebuah desa yang telah terbentuk menjadi sebuah desa baru setelah pemekaran dari desa Boal kecamatan Empang. Setelah menjadi desa persiapan dari tahun 2003 hingga di tetapkan menjadi sebuah desa pada tahun 2007 berdasarkan peraturan daerah kabupaten Sumbawa tahun 2006. Salah satu alasan dimekarkannya desa ini dikarenakan jarak dari desa induk terlalu jauh sehingga proses pelayanan cukup sulit di dapatkan oleh masyarakat setempat. Desa Gapit kurang lebih sebelas tahun di mekarkan dari desa Boal dan telah melaksanakan pembangunan dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi dan politik.

Sebelum melakukan pemekaran, Gapit merupakan salah satu dusun dari desa Boal, namun selama Gapit bergabung, potensi-potensi yang ada di Gapit ini belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah. Selain itu lokasi Gapit yang sedikit tersentuh oleh pembangunan dan juga karena jarak desa induk yang berada lumayan jauh dari Gapit mempersulit masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan sehingga dengan dasar inilah masyarakat Gapit menyampaikan aspirasinya untuk melakukan pemekaran dari desa Boal. Kondisi dari berbagai aspek di desa Gapit sebelum dimekarkan belum memadai dan juga terdapat masalah yang utama yaitu pada pembangunan, dimana ketika pemekaran dari desa Boal terjadi tidak terdapat sarana sebagai tempat melayani masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Desa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan diciptakannya pengaturan desa salah satunya adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Syarat pembentukan Desa sesuai dengan pasal 8 ayat 3 menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk yaitu:

- 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga.
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) Jiwa atau 1.000 (Seribu) Kepala Keluarga.
 - 3) Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 (empat ribu) Jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga.
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Jiwa atau 600 (enam ratus) Kepala Keluarga.
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga.
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga.
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) Jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga.
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) Jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga.
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 - f. Batas wilayah desa yang di nyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - g. Sarana dan Prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pembangunan

Pokok-pokok dari proses pembangunan suatu bangsa yang pada hakikatnya merupakan suatu perjuangan dari bangsa tersebut dalam menghadapi keterbelakangan dan hambatan hambatan di berbagai bidang baik bidang ekonomi politik maupun sosial budayanya.

Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang di putuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi dengan mengukur produktifitas masyarakatnya.

Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama. Adapula yang mengartikan pembangunan masyarakat sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pakar lain

memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat.

Konsep Pemekaran Desa

Menurut Juanda (2007), tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membentuk daerah yang mandiri dan demokratis. Tujuan ideal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme birokrasi daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, dapat menciptakan kesempatan lebih luas untuk masyarakat, serta dapat akses langsung pada unit-unit pelayanan publik yang tersebar dan mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan maupun kota.

Istilah pemekaran berasal dari kata “mekar” dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak”. Dari kata mekar maka pemekaran artinya pengembangan atau membentuk menjadi banyak.

Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah tingkat pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan diri masyarakat, bangsa dan negara.

Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dari masyarakat, karena terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Dalam UU No. 36 tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sarana Pelayanan

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut AG. Subarsono (Agus Dwiyanto, 2005: 141) pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan wargapengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian, sertifikat.

d. Sarana Jalan

Menurut Adji Adisasmita (2011:79), mengatakan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air.

Aspek Ekonomi

Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah jenis pekerjaan utama (pokok) dan pekerjaan sampingan yang digeluti oleh masyarakat di Desa Gapit sebagai sumber kehidupan atau sumber pendapatan.

Pendapatan Perkapita

Dalam ilmu ekonomi, pendapatan perkapita diartikan sebagai keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Secara garis besarnya faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat terdiri atas tenaga kerja, modal, tanah dan keahlian atau skill.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif maka akan diperoleh sebuah gambaran dan jawaban yang berkenaan dengan pokok permasalahan yaitu dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Gapit.

Informan Penelitian

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan tehnik snowball. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan yaitu:

- a. Kepala Desa Gapit
- b. Sekertaris desa
- c. Bendahara Desa
- a. Guru Honorer
- b. Petani
- c. Buruh Tani
- d. Peternak
- e. Pedagang

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah konsep teoritis yang mendukung penelitian.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa data langsung yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dengan responden dan observasi yaitu mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Kantor Desa Gapit.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekam suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi dengan wawancara mendalam. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik Analisis Data

Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan setelah data direduksi, kemudian disajikan baik bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, sehingga dengan adanya penyajian tersebut dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Pada tahap ini, kesimpulan yang ditarik bersifat sementara, dan akan berubah lagi apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada pengumpulan data berikutnya.

Dalam teknik pengumpulan data, Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Sosial

Sarana Pendidikan

Pendidikan di desa Gapit di titik beratkan pada peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan yaitu mulai dari TK sampai dengan sekolah lanjutan atas (SLTA). Untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah dilihat dari aspek pendidikan yang mereka miliki. Sebab dengan faktor pendidikan ini seseorang dapat mengelola setiap kegiatan usaha, misalnya cepat menerima informasi pada berbagai setor kegiatan usaha yang berasal dari berbagai sumber informasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Anwar selaku Kepala Desa Gapit ketika ditanya indikator dampak pemekaran terhadap sarana pendidikan berikut

“Bagusnya dengan dimekarkannya desa Gapit, sehingga menjadi dasar berdirinya SMP 3 Empang di Cabang Boal karena ada berdiri penyangga-penyangga tertentu dari Desa Gapit sehingga masalah pendidikan anak-anak tidak perlu lagi bersekolah di Empang dengan jarak yang sekian kita tau sendiri. Kemudian, dengan pemekaran wilayah kewenangan pendidikan dasar terutama PAUD dan TK termasuk ke dalam kewenangan Desa sehingga di Gapit dengan adanya pemekaran wilayah, kita sudah

mendirikan dua TK dan dua PAUD sehingga masalah pendidikan dasar itu lebih baik”. (wawancara tanggal 2 Mei 2019 Pukul 8.28 WITA)

Tingkat pendidikan yang cukup memadai dapat menentukan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu tingkat pendidikan juga menjadi landasan untuk menentukan pilihan masa depan selanjutnya baik pekerjaan maupun keterlibatannya dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yakub selaku Sekertaris Desa Gapit ketika ditanya indikator dampak pemekaran terhadap sarana pendidikan berikut

“Bisa dilihat rata-rata sejak tahun setelah pemekaran masyarakat Gapit mulai memiliki keinginan untuk menyekolahkan anak anaknya ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang juga bisa dilihat tamatan S1 disini sudah lumayan ketimbang sebelum pemekaran kan baru beberapa, jadi pengaruh ekonomi untuk Gapit salah satunya yah bendungan Gapit ini, karena taraf hidup masyarakat juga sudah membaik jadi bisa menyekolahkan anak nya ke jenjang yang lebih tinggi”. (wawancara tanggal 21 Mei 2019 Pukul 14.41)

Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai juga cukup penting untuk kesejahteraan masyarakat terlebih untuk maksimalnya proses belajar bagi masyarakat terutama anak anak. Sebagai penerus bangsa pendidikan merupakan modal penting agar dapat menciptakan prestasi. Gapit setelah pemekaran mulai memperhatikan pendidikan, baik itu dibangunnya sarana pendidikan yang memadai.

Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Bendahara Desa Gapit ketika ditanya indikator dampak pemekaran terhadap sarana pendidikan berikut

“Untuk pendidikan yah cukup signifikan, untuk pendidikan dasarnya sudah ada tiga sekolah yaitu SDN 1 GAPIT, SDN 2 GAPIT dan SDN 3 NYARINYING. Kita lihat pendidikannya banyak anak yang dari desa Gapit mencapai prestasi di tingkat kecamatan kabupaten bahkan nasional, bahkan di bidang olahraga juga yah lumayanlah meningkat”. (wawancara 4 Mei 2019 Pukul 11.54 WITA)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabri selaku Masyarakat ketika ditanya indikator dampak pemekaran terhadap sarana pendidikan berikut

“Karena saat pemekaran jadi perubahan pendidikan melesat dari 30 % menjadi 70 %”. (Wawancara tanggal 21 mei 2019 Pukul 15.10 WITA)

Hasil wawancara dengan Ibu Pitriyanti selaku Guru Honorer ketika ditanya indikator dampak pemekaran terhadap sarana pendidikan berikut

“Semoga sekolah di desa Gapit semakin maju, banyak siswa siswi dari SD Gapit ikut OSN, O2SN malahan kemarin ada siswa yang juara dua renang tingkat kabupaten”. (Wawancara tanggal 4 mei 2019 Pukul 12.42 WITA)

Indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan disajikan pada Tabel 4.4. Pada tabel tersebut disajikan jumlah ketersediaan sarana pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai jenjang SLTA setelah pemekaran.

Sarana Kesehatan

Pembangunan kesehatan di desa Gapit dititik beratkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan seseorang maka hal ini cenderung akan meningkatkan produktivitas seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Suatu desa dianggap berhasil pembangunannya apabila fasilitas yang dibangun digunakan dengan efektif.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Anwar selaku Kepala Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Kalau untuk fasilitas kesehatan kan ada beberapa macam, yang termasuk dalam kewenangan kabupaten adalah puskesmas sudah berjalan dengan cukup baik termasuk bidan desa, malahan lewat anggaran dana desa kita menyiapkan tunjangan bagi bidan pembantu, karena di masing-masing desa kan ada dua bidan, yang PNS dan Honorer, tunjangan yang honorerlah yang dianggarkan melalui dana desa” (wawancara tanggal 2 Mei 2019 Pukul 8.28 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yakub selaku Sekertaris Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Hampir tiap bulan ada program dari puskesmas tentang pelayanan kesehatan baik balita untuk ibu hamil, terakhir kemarin sosialisasi tentang rabies”. (wawancara Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 14.41 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan ibu Pitriyanti selaku Guru Honorer dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sudah efektif, waktu Posyandu kita dikasih bantuan dana PMT oleh desa”. (wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.42 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan bapak Muhammad Sabri selaku Masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sudah efektif, keefektifannya mencapai 85 % “. (wawancara Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 15.10 WITA)

Untuk mencapai keadaan tersebut, desa Gapit selama tahun-tahun setelah pemekaran telah melakukan pembangunan sarana pelayanan dan juga berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk menopang tingkat kesehatan masyarakat desa tersebut. Sesuai yang diutarakan oleh bapak Syamsul Anwar selaku kepala desa Gapit sebagai berikut,

“Di anggaran dana desa juga di atur, dari sekian anggaran sudah dialokasikan sekitar 10 % untuk anggaran kesehatan, PMT, Pemberian bahan makanan untuk gizi buruk termasuk kegiatan Posyandu, bantuan jamban untuk masyarakat termasuk pembuatan drainase dimasing masing dusun. Tentunya program ini sangat berpengaruh terhadap semua masyarakat yang ada di Gapit ini termasuk saya dan keluarga saya”. (wawancara tanggal 2 Mei 2019 Pukul 8.28 WITA)

Sebelum desa dimekarkan, sarana pelayanan kesehatan di desa tidak tersedia dan tidak adanya perawat, hal ini membuat masyarakat sedikit terbebani karena jarak puskesmas yang jauh dari wilayah desa.

Sementara Itu hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Masalah kesehatan tentu semakin kecil wilayah desa yang di atur semakin meningkat segala macam bantuan untuk kesehatan seperti bantuan atau program untuk balita dan ibu hamil”(wawancara tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.52 Wita)

Pada priode setelah pemekaran, ketersediaan sarana kesehatan telah mengalami peningkatan yaitu berdirinya satu buah puskesmas dan satu bidan desa. Cara pelayanannya kepada masyarakat masih menggunakan sistem kekerabatan yaitu cukup mendatangi bidan makan bidan tersebut siap melayani di rumah masyarakat. Namun meskipun sarana yang dibangun sudah memadai, ada hal-hal yang pelaksanaannya yang masih kurang.

Sementara Itu hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Bendahara Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Lebih dioptimalkan lagi, yang kita lihat kan masalah MCK sanitasi itu masih ada dusun di wilayah kita yang masih belum optimal, BAB sembarangan masih banyak kita jumpai, namun sudah minim dan masalah itu mungkin bisa di optimalkan lagi, dan dibangun MCK agar masyarakat tidak ada yang BAB sembarangan lagi, hal itu kan untuk menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri “.(wawancara tanggal 4 mei 2019 Pukul 11.54 WITA)

Sarana Pelayanan Publik

Sarana pelayanan merupakan salah satu pembangunan yang penting untuk majunya suatu daerah. Dengan semakin meningkatnya pembangunan dibidang sarana pelayanan maka akan semakin memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan baik itu dari segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Sebelum Gapit dimekarkan banyak permasalahan terkait pelayanan yang sangat sulit didapatkan, penyebabnya karena jauhnya wilayah desa induk.

Sementara Itu hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak Atta selaku Masyarakat Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sangat baik, karena menyebabkan pelayanan masyarakat yang dulunya kan waktu bergabung dengan Boal, Gapit masih berstatus sebagai dusun, pelayanan masyarakat jauh dari desa, sehingga dengan adanya pemekaran pelayanan jadi mudah, dekat berurusan dengan kantor desa, dengan adanya pemekaran ini sangat menguntungkan bagi masyarakat”. (wawancara tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.52 Wita)

“Sebelum ada pemekaran itu termasuk juga masyarakat sulit, kita pemerintah desa juga sibuk kalau ada kegiatan tetap di sana (desa Boal), jadi masyarakat juga butuh biaya untuk berangkat ke desa Boal kan dari

transportasinya karna jauh”. (wawancara tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.52 Wita)

Sementara Itu hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Bendahara Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Yah bisa kita lihat, dulunya berpusat di desa Boal, jadi pengembangan-pengembangan yang ada di desa hanya di wilayah Boal saja jadi minim, bisa dikatakan bahwa Gapit ini dianaktirikan, kalau sekarang setelah pemekaran sudah kita lihat pemerataan nya sudah merata di desa Gapit”.(wawancara tanggal 4 Mei 2019 Pukul 11.54 WITA)

Sementara Itu hasil wawancara dengan Ibu Pitriyanti selaku Guru Honorer dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Setelah pemekaran wilayah nya sudah terpisah jadi sehingga pelayanan dipermudah, dulu sebelum pemekaran Gapit dan Boal masih satu jadi pelayanan belum terjamin, ketika wilayah desa dimekarkan otomatis masing-masing masyarakat desa tahu apa yang harus dilakukan untuk desanya seperti apa sarana yang harus dibuat. Di desa sekarang sudah mempunyai motor Viar untuk membantu kegiatan masyarakat setempat, Alhamdulillah dengan adanya sarana pelayanan tersebut saya rasa sudah bisa mensejahterakan masyarakat”. (wawancara tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.42 WITA)

Sementara Itu hasil wawancara dengan bapak Muhammad Sabri selaku Masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sebelum pemekaran pelayanannya itu kurang, namun setelah pemekaran Alhamdulillah kesediaan pelayanan untuk masyarakat mencapai 90 %”.(wawancara tanggal 21 Mei 2019 Pukul 15.10 WITA)

Sarana Jalan

Jalan merupakan salah satu sarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar roda kegiatan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana akan menuntun peningkatan pembangunan seperti jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu desa ke desa lainnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Anwar selaku Kepala Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Ada Peningkatan kapasitas jalan, kalau drainase sudah mencapai 97 %, kemudian jalan aspal kira-kira sudah 60 %”. (wawancara Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 8.28 WITA)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabri selaku Masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sebelum pemekaran sarana jalan kan masih agak kurang mengenai fasilitas, setelah pemekaran Alhamdulillah sarana jalan mencapai 80 %”.(wawancara Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 15.10 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Bendahara Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Dulu kan belum ada yang namanya gang-gang desa, dan masih banyak kubangan yang kita lihat, sekarang Alhamdulillah sudah banyak yang terlaksana, seperti lapen, ada trotoar, papin blok Alhamdulillah bedanya sudah jelas terlihat, dulu yang berkubangan sekarang sudah mulus. Dan untuk selanjutnya masih banyak yang belum diperbaiki, karena desa ini terbilang masih baru, masih banyak gang yang belum ditangani, tapi Alhamdulillah untuk sampai saat ini di tahun 2018 hampir 70 % untuk gang nya, sarana jalaan sudah diperbaiki dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya”. (wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 11.54 WITA)

Dengan adanya pemekaran desa masyarakat akan mandiri untuk membangun desa nya menjadi lebih baik, namun hal itu juga tidak terlepas dari program bantuan pemerintah.

Sementara itu hasil wawancara dengan ibu Pitriyanti selaku Guru Honorer dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Waktu sebelum mekar, jalandisini masih batu tanah biasa, sekarang sudah banyak perubahan sudah ada trotoar. Dan juga dengan adanya bantuan dana desa sebesar 1 Miliar yang membantu pembangunan”. (wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.42 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan Abdul Razak Atta selaku Tokoh masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sebelum pemekaran itu gang-gang jalan masih jalan biasa, karna mungkin dulu kan anggaran nya masih terbatas masih pakai subsidi belum punya anggaran sendiri. Sekarang kan setelah pemekaran jalan itu sudah bisa di aspal, sudah di base beton bisa dilihat sudah meningkat sekarang”. (Wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.52 WITA)

Hasil wawancara dengan Abdul Razak Atta selaku Tokoh masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Banyak sekali, dulu kan bisa dibilang kalau hujan becek nya setengah mati, kalau setelah pemekaran sudah bisa diatur sendiri mana yang harus di perbaiki”. (wawancara Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 14.41 WITA)

Aspek Ekonomi

Jenis Pekerjaan

Indikator yang dapat dilihat yang berhubungan dengan aspek ekonomi adalah dari aspek jenis pekerjaan pokok maupun sampingan yang ditekuni masyarakat, karena dengan jenis pekerjaan tersebut akan mempengaruhi perekonomian mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disamping memiliki pekerjaan pokok, masyarakat desa Gapit juga memiliki pekerjaan lain sebagai sumber pendapatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Anwar selaku Kepala Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

”Sangat berpengaruh, karena dengan adanya pemekaran wilayah ini telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk saya, yang dulu saya hanya bekerja sebagai petani dan peternak, lalu saya menjadi staf desa sebelum terpilih menjadi kepala desa”. (wawancara Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 8.28 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan Abdul Razak Atta selaku Tokoh masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sangat berpengaruh, lebih meningkat.karena pada dasarnya kan lebih kecil ruang lingkup daerah yang kita kelola kan maka lebih besar kebutuhannya, bayangkan lima dusun kan, jadi daerah yg besar jadi sedikit peluang kita untuk mendapatkan kerjaan sampingan. Sekarang setelah pemekaran maka semakin luas kesempatan untuk kesempatan kerja terutama mendapat pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan saya itu buka kios”. (wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 11.52 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Bendahara Desa Gapit dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sangat baik, iyah ada, bisnis kecil, jual beli onlian, PPOB untuk pulsa listrik, prabayar BPJS”. Pekerjaan pokok Masyarakat di desa Gapit rata-rata adalah petani dan peternak, hampir seluruh masyarakat pekerjaan tani dan ternak jalan bersamaan. Sesuai dengan penuturan bapak Abdul Razak Atta berikut

“Di Gapit Sekitar 30% yg semata mata peternak, disini ternak dan tani itu tetapdua-dua nya jalan. saya juga Peternak dan Petani ”.(Wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.52 WITA)

Sesuai dari penuturan informan dapat dikatakan bahwa dari aspek ekonomi masyarakat cukup baik ditinjau dari jenis pekerjaan, sebab semua informan dalam penelitian ini apabila dilihat dari sebelum dan sesudah pemekaran sudah memiliki pekerjaan yang berarti bahwa masyarakat telah memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya informan memiliki dua sumber pendapatan, yaitu dari pekerjaan pokok dan sampingan, dan dari sumber pendapatan tersebut mereka akan mampu meningkatkan kondisi perekonomiannya.

Pendapatan

Pendapatan adalah balas jasa yang diterima seseorang setelah melakukan sesuatu kegiatan tertentu, dengan demikian tidak semua orang mempunyai tingkat pendapatan yang sama. Sehubungan dengan itu pendapatan juga adalah salah satu komponen tingkat kesejahteraan. Makin tinggi tingkat pendapatan yang diterima seseorang maka makin besar konsumsi yang dilakukan atau semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi. Demikian halnya dengan masyarakat di Desa Gapit, bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahanya merupakan salah satu komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Anwar selaku Kepala Desa Gapitdengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sebelum pemekaran (Peternak dan Petani) pendapatan kotor sebesar Rp. 50.000.000 pertahun ketika sesudah pemekaran bertambah yaitu dengan pendapatan kotornya sebesar Rp. 80.000.000 pertahun dan Sesudah pemekaran (kepala desa) Rp. 3.000.000 per bulan “ (wawancara Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 8.28 Wita)

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Bendahara Desa Gapitdengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sebelum pemekaran saya masih sekolah, setelah pemekaran ini saya menjadi bendahara desa, pendapatan kotor nya kira kira Rp. 1.500.000 lah per bulan”. (Wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 11.54 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabri selaku Masyarakatdengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Sebelum pemekaran, pendapatan kita kurang dari 50 % dari pertanian kan permusim sebelum pengairan kan kurang memadai namun setelah pemekaran pengairannya cukup memadai mencapai 80 %, tahun ini saya 2 kali, musim hujannya padi musim kemarau nya jagung, Alhamdulillah pendapatan saya dari lahan 1 hektar untuk musim hujan dengan pendptan bersih sebesar Rp. 16.000.000 untuk padi”.(Wawancara Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 15.10 WITA)

Sementara itu hasil wawancara dengan ibu Pitriyanti selaku Guru Honorer dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Berapa sih gaji honorer paling banyak lah Rp. 700.000 itupun dikasih bonus sama kepala sekolah, kalau gak dikasih yah kurang. Kalau pendapatan dari tani saya punya tanah cuma berapa are yah bisa untuk mencukupi kebutuhan”. (Wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.42 Wita)

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak Atta selaku Tokoh masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Disatu sisi kita ini petani tulen kemudian juga kita punya usaha sampingan bisa ada peningkatan pendapatan”. (Wawancara Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 12.52)

Sementara itu hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yakub selaku Sekertaris Desa Gapitdengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

“Saya kan Pegawai Negeri yah, dulun kan rata-rata 1 juta, setelah pemekaran 1 sampai 3 Juta. Kalau tani kan permusim ada yang bisa 2 atau 3 kali panen, tapi kebanyakan disini itu dua kali Produktifitas masyarakat desa Gapit itu pertanian, tinggi tingkat produktifitasnya karna penduuduk rata rata punya tanah 2 hektar”.(Wawancara Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 14.41 WITA)

Dari informan yang telah memberikan jawaban tentang peningkatan pendapatannya, menunjukkan kontribusi yang besar dengan adanya pemekaran di Desa Gapit Kecamatan Empang.

Pembahasan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas mengenai sosial ekonomi masyarakat dengan melihat dari aspek kesejahteraan masyarakat di Desa Gapit menunjukkan suatu gambaran pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang baik, hal ini dapat dilihat dari indikator ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yang meningkat karena secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbandingan ketersediaan sarana ekonomi dari sebelum dan setelah pemekaran mengalami perubahan yang pesat dikarenakan jumlah pembangunan menjadi sangat banyak dan jauh berkembang.

Indikator sosial yang dapat dilihat dari sarana pendidikan yaitu adanya peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) Sebab dengan faktor pendidikan ini dapat menentukan setiap tindakannya terutama dalam mengelola setiap kegiatan usaha, misalnya cepat menerima informasi pada berbagai sektor kegiatan usaha yang berasal dari berbagai sumber informasi, baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

Sarana kesehatan, menunjukkan hal yang baik pula dimana pembangunan kesehatan dititik beratkan pada peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, dimana semakin baik tingkat kesehatan seseorang maka hal ini cenderung akan lebih meningkatkan produktivitas seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Selanjutnya sarana jalan telah memiliki sarana jalan yang baik pula dimana ditunjukan dengan meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang mana akan menuntun peningkatan pembangunan seperti jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu desa ke desa lainnya.

Demikian pada indikator ekonomi dapat dilihat dari segi jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat dimana bahwa seluruh informan telah memiliki dua pekerjaan sehingga dari kedua sumber pendapatan tersebut mereka mampu meningkatkan perekonomiannya. Sedangkan pada peningkatan pendapatan masyarakat juga menunjukkan hasil yang meningkat pula.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa dan masyarakat dalam menjalankan tata kelola desa untuk lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan pembangunan desa seperti tersedianya dan terjangkaunya sarana sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk menunjang aktivitas hidupnya.

Pada pembahasan dampak pemekaran Desa ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai dampak pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gapit. Hal ini penting karena untuk memperbaiki keadaan atau kehidupan masyarakat dimasa mendatang dan juga untuk melihat apakah pemekaran yang dilakukan oleh Desa Gapit memiliki dampak kearah yang lebih baik setelah mekar dari Desa Boal. Dampak pemekaran desa adalah pengaruh kuat

yang dapat menimbulkan akibat seperti meningkatkan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana jalan, jenis pekerjaan dan pendapatan. Oleh karena itu, dampak pemekaran desa sangat penting dalam meningkatkan pembangunan, karena dengan pemekaran disini dapat berdampak positif terhadap pengembangan suatu Desa. Adapun dampak pemekaran Desa dengan pengaruh yang kuat dapat menimbulkan akibat sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana pendidikan. Maksudnya dengan pemekaran desa diharapkan dapat menciptakan suatu peningkatan pendidikan dan perluasan wajib belajar mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
2. Meningkatkan sarana kesehatan. Maksudnya dengan pemekaran desa diharapkan adanya tambahan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang tingkat kesehatan masyarakat seperti tersedianya sebuah gedung kesehatan yang dapat memungkinkan meningkatnya mutu pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, karena salah satu alasan pemekaran adalah pelayanan dan dengan pemekaran ini masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.
3. Meningkatkan sarana pelayanan. Maksudnya adalah dengan pemekaran desa diharapkan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana agar lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan akan menuntun pada peningkatan pembangunan.
4. Meningkatkan sarana jalan. Maksudnya adalah dengan pemekaran desa diharapkan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang akan menuntun pada peningkatan pembangunan.
5. Jenis pekerjaan yang dimaksudkan adalah jenis pekerjaan utama (pokok) dan pekerjaan sampingan yang digeluti oleh masyarakat di Desa Gapit sebagai sumber kehidupan atau sumber pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan masyarakat setiap bulannya yang diterima oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya di Desa Gapit yang bekerja baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan diukur dengan Rp/bulan.
6. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan masyarakat setiap bulannya yang diterima oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya di Desa Gapit yang bekerja baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan diukur dengan Rp/bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, menunjukan bahwa pemekaran yang dilakukan di desa Gapit memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat baik dari Aspek Sosial yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sarana Pelayanan dan Aspek Ekonomi yaitu Pendapatan Jenis Pekerjaan.

REKOMENDASI

Diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya agar masyarakat berupaya terus menerus sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga pendapatan mereka meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

Adjisasmita, H Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Adjisasmita, Sakti Adji. 2011. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Agung, Muliawan. 2016. *Pengaruh Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Makasar
- Agus Dwiyanto (ed). 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*.
- Agussalim. 2018. *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat keajahteraan masyarakat kabupaten Sumbawa tahun 2004-2016*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen universitas samawa: Sumbawa.
- Anonim. 2004. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Anonim. 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Manengah Nasional) 2004-2009. Jakarta.
- Anonim. 2009. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Anonim. 2014. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa. Permata Press
- Anonim. 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Badan Pusat Statistika, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press
- Harun, HRocjahat Dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: Perspektif Domian, Kaji Ulang, Dan Teori Kritis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasriani. 2016. *Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kendari.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Cv Pustaka Sastra.
- Joko Widodo. 2001. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV
- Juanda. 2007. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cet. Pertama. Balai Pustaka. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Nurdin Fadhil M, 1990. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Angkasa, Bandung. Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Rambe, A. 2004. *Alokasi pengeluaran rumah tangga dang tingkat kesejahteraan (kasus dikecamatan medan kota, Sumatra utara)* tesis sekolah pasca sarjana IPB Bogor.
- Rinaldi Mirsa. 2011. *Elemen Tata Ruang Kota*. Lhokseumawe: Graha Ilmu.
- Saragih, Julia Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiscal Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Taslim, Arifin. 2004. *Metode kesejahteraan masyarakat*. IPB. Bogor.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Cv Fokus Media.

Wirartha, I Made. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI.